



Edukasi Hukum dan Kesehatan : Sinergi Dosen Interdisipliner dalam Penguatan Literasi Hak Kesehatan

Legal and Health Education : Interdisciplinary Faculty Synergy in Strengthening Health Rights Literacy

Muhammad Ahwan^{1*}, Agus Suryanto², Suryadi³, Ucik Ernawati⁴, Naylil Mawadda Rohma⁵, Tri Rettagung Diana⁶, Dyah Erlina Sulistyaningrum⁷

^{1,3,7} Ilmu Hukum, FH, Universitas Merdeka Malang

²Universitas Soeryo Ngawi

⁴Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Buana Husada Ponorogo

⁵Keperawatan, FK, Universitas Muhammadiyah Ponorogo

⁶Akademi Kesejahteraan Ibu Kartini Semarang

Alamat: Jalan Terusan Dieng. 62-64 Klojen, Pisang Candi, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65146

*Korespondensi penulis: muhammad.ahwan@unmer.ac.id

Article History:

Naskah Masuk: 04 Agustus, 2025;

Revisi: 18 Agustus, 2025;

Diterima: 02 September, 2025;

Tersedia: 04 September, 2025

Keywords: Community Service; Health Literacy; Health Rights; Interdisciplinary Collaboration; Legal Education

Abstract: Public literacy regarding health rights remains low, especially in communities with limited access to legal and health-related information. This lack of understanding often leads to unfulfilled rights and unequal access to quality healthcare services, contributing to a cycle of inequity and poor health outcomes. In response to this issue, this community service program seeks to enhance public awareness of health rights through interdisciplinary education, combining the expertise of lecturers from legal and health sciences. The program's activities include the development of educational modules designed to provide clear, accessible information about health rights, as well as interactive legal-health counseling sessions aimed at addressing specific concerns. Group discussions serve as a platform for individuals to engage with experts and peers, furthering their understanding of how to navigate healthcare systems and advocate for their rights. Additionally, printed materials are distributed to reinforce learning and serve as ongoing references for participants. The program targets communities with high needs for health literacy, focusing on empowering individuals to recognize their rights and take action to ensure their healthcare needs are met. It also encourages the collaboration of interdisciplinary academic staff, fostering a collective approach to community empowerment. By improving health literacy, the program aims to promote social equity and improve access to quality healthcare services for underserved populations. Through this initiative, participants are better equipped to make informed decisions regarding their health and advocate for fair treatment in the healthcare system.

Abstrak

Literasi publik mengenai hak-hak kesehatan masih rendah, terutama di komunitas dengan akses terbatas terhadap informasi hukum dan kesehatan. Kurangnya pemahaman ini seringkali menyebabkan hak-hak yang tidak terpenuhi dan akses yang tidak merata terhadap layanan kesehatan berkualitas, yang berkontribusi pada siklus ketidakadilan dan hasil kesehatan yang buruk. Menanggapi masalah ini, program pengabdian masyarakat ini berupaya meningkatkan kesadaran publik tentang hak-hak kesehatan melalui pendidikan interdisipliner, yang menggabungkan keahlian dosen dari ilmu hukum dan ilmu kesehatan. Kegiatan program ini meliputi pengembangan modul pendidikan yang dirancang untuk memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang hak-hak kesehatan, serta sesi konseling hukum-kesehatan interaktif yang ditujukan untuk mengatasi

masalah-masalah spesifik. Diskusi kelompok berfungsi sebagai wadah bagi individu untuk berinteraksi dengan para ahli dan rekan sejawat, meningkatkan pemahaman mereka tentang cara menavigasi sistem layanan kesehatan dan mengadvokasi hak-hak mereka. Selain itu, materi cetak didistribusikan untuk memperkuat pembelajaran dan menjadi referensi berkelanjutan bagi peserta. Program ini menyasar komunitas dengan kebutuhan literasi kesehatan yang tinggi, dengan fokus pada pemberdayaan individu untuk mengenali hak-hak mereka dan mengambil tindakan guna memastikan kebutuhan layanan kesehatan mereka terpenuhi. Program ini juga mendorong kolaborasi staf akademik interdisipliner, yang mendorong pendekatan kolektif terhadap pemberdayaan masyarakat. Dengan meningkatkan literasi kesehatan, program ini bertujuan untuk mendorong kesetaraan sosial dan meningkatkan akses layanan kesehatan berkualitas bagi populasi yang kurang terlayani. Melalui inisiatif ini, para peserta lebih siap untuk membuat keputusan yang tepat terkait kesehatan mereka dan mengadvokasi perlakuan yang adil dalam sistem layanan kesehatan.

Kata Kunci: Hak Kesehatan; Kolaborasi Interdisipliner; Literasi Kesehatan; Pendidikan Hukum; Pengabdian Masyarakat

1. PENDAHULUAN

Hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional, termasuk dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Kesehatan. Dalam praktiknya, pemahaman masyarakat terhadap hak-hak kesehatan masih sangat terbatas. Ketidaktahuan ini membuat masyarakat seringkali menerima pelayanan kesehatan yang tidak layak tanpa menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil, aman, dan bermutu.

Rendahnya literasi hukum dan kesehatan ini tidak hanya disebabkan oleh kurangnya informasi, tetapi juga oleh keterbatasan pendekatan edukatif yang menyentuh dua aspek secara bersamaan. Selama ini, edukasi kesehatan dan edukasi hukum cenderung berjalan sendiri-sendiri, sehingga belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara komprehensif. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi interdisipliner antara bidang hukum dan kesehatan dalam upaya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak dasarnya dalam memperoleh layanan kesehatan.

Pengabdian kepada masyarakat ini dirancang sebagai bentuk kolaborasi dosen lintas disiplin, yaitu dari bidang hukum dan bidang kesehatan, untuk memberikan edukasi terpadu mengenai hak-hak kesehatan. Melalui kegiatan ini, masyarakat akan diberi pemahaman yang menyeluruh mengenai aspek legal dan medis dari hak atas kesehatan, serta didorong untuk lebih berani menyuarakan dan melindungi hak mereka. Kegiatan ini juga diharapkan menjadi media pembelajaran lintas keilmuan yang relevan dengan semangat Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), serta memperkuat peran perguruan tinggi dalam pemberdayaan masyarakat berbasis keilmuan.

Permasalahan hak kesehatan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan aspek medis, tetapi juga erat dengan aspek hukum. Misalnya, seseorang yang tidak mendapat layanan

kesehatan yang layak mungkin tidak memahami prosedur pengaduan atau dasar hukum untuk menuntut haknya. Di sisi lain, pemahaman medis sangat diperlukan agar edukasi tidak hanya berhenti pada teori hukum, tetapi juga menyentuh aspek praktis mengenai standar pelayanan, promosi kesehatan, dan pencegahan penyakit.

Melibatkan dosen interdisipliner dari bidang hukum dan kesehatan memberikan pendekatan yang lebih komprehensif. Dosen hukum akan menjelaskan tentang dasar hukum, hak-hak pasien, regulasi kesehatan, dan mekanisme perlindungan hukum. Sementara itu, dosen kesehatan akan menjelaskan kondisi medis, pentingnya akses terhadap layanan kesehatan, serta perilaku hidup sehat sebagai bagian dari pemenuhan hak kesehatan.

Kegiatan pengabdian ini menggandeng kader 'Aisyiyah sebagai mitra utama karena mereka merupakan garda terdepan dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan keagamaan. Sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah yang telah lama bergerak dalam bidang sosial-keagamaan, 'Aisyiyah memiliki jaringan kader yang aktif di tingkat akar rumput dan memiliki hubungan langsung dengan komunitas, terutama perempuan dan keluarga.

Kader 'Aisyiyah dikenal memiliki kepedulian tinggi terhadap isu-isu kesehatan masyarakat, seperti stunting, gizi anak, kesehatan ibu dan anak, serta kampanye hidup bersih dan sehat. Namun, meskipun mereka aktif dalam kegiatan promotif dan preventif di bidang kesehatan, banyak kader yang belum mendapatkan edukasi mendalam terkait hak-hak kesehatan dari sisi hukum. Padahal, dalam praktik di lapangan, mereka sering menjadi tempat masyarakat bertanya dan mengadu ketika menghadapi persoalan layanan kesehatan.

Dengan menjadikan kader 'Aisyiyah sebagai mitra, kegiatan ini akan lebih efektif menjangkau masyarakat luas, karena kader sudah memiliki basis kepercayaan dan kedekatan sosial dengan warga. Selain itu, edukasi kepada kader juga memiliki efek multiplikasi (multiplier effect), karena ilmu yang mereka peroleh dapat diteruskan kepada anggota dan masyarakat binaan mereka secara berkelanjutan. Kemitraan ini juga sejalan dengan visi pemberdayaan perempuan dalam peran strategis membangun kesehatan masyarakat melalui pendekatan yang tidak hanya bersifat medis, tetapi juga memperhatikan aspek hukum dan perlindungan hak-hak warga negara.

Kegiatan pengabdian ini menghadirkan pendekatan interdisipliner yang terpadu antara bidang hukum dan kesehatan untuk memperkuat literasi hak kesehatan masyarakat, yang selama ini sering dilakukan secara terpisah. Fokus khusus pada edukasi hak kesehatan, termasuk aspek hukum perlindungan dan mekanisme pengaduan, menjadikan program ini berbeda dari edukasi kesehatan konvensional yang lebih menitikberatkan pada aspek medis

saja. Selain itu, penguatan kapasitas kader ‘Aisyiyah sebagai agen perubahan di komunitas memberikan nilai tambah berupa efek multiplikasi pengetahuan secara berkelanjutan. Pengembangan modul edukasi berbasis komunitas yang kontekstual juga menjadi inovasi penting untuk mendukung keberlanjutan dan replikasi program ini di wilayah lain. Pendekatan kolaboratif lintas disiplin dan berbasis pemberdayaan masyarakat ini sejalan dengan semangat Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) serta memperkuat sinergi antara akademisi dan masyarakat.

2. METODE

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif dan interdisipliner yang melibatkan dosen dari bidang hukum dan kesehatan serta kader Pimpinan Cabang ‘Aisyiyah Bungkal sebagai mitra pelaksana di lapangan. Metode yang diterapkan meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

Identifikasi dan Koordinasi Mitra

Melakukan koordinasi awal dengan pengurus dan kader Pimpinan Cabang ‘Aisyiyah Bungkal untuk mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik masyarakat sasaran serta menentukan waktu dan lokasi pelaksanaan.

Penyusunan Modul Edukasi

Tim dosen hukum dan kesehatan bersama-sama menyusun modul edukasi yang mengintegrasikan aspek hukum dan kesehatan, dengan bahasa yang mudah dipahami dan disesuaikan dengan kondisi lokal.

Sosialisasi dan Promosi Kegiatan

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui Pimpinan Cabang ‘Aisyiyah Bungkal untuk mengundang partisipasi aktif warga dalam kegiatan edukasi.

Pelaksanaan Edukasi Interaktif

Menyelenggarakan sesi edukasi berupa penyuluhan dan seminar interaktif yang menghadirkan narasumber dari bidang hukum dan kesehatan. Kegiatan ini juga mencakup diskusi kelompok dan studi kasus sederhana yang memungkinkan peserta aktif bertanya dan berbagi pengalaman.

Distribusi Modul dan Media Edukasi

Memberikan modul cetak dan materi edukasi lainnya kepada peserta dan kader Pimpinan Cabang ‘Aisyiyah Bungkal sebagai bahan rujukan dan media penyebaran pengetahuan secara berkelanjutan.

Monitoring dan Evaluasi

Melakukan evaluasi melalui pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Selain itu, dilakukan pengumpulan feedback dari peserta dan kader mitra untuk perbaikan kegiatan selanjutnya.

Pelaporan dan Dokumentasi

Menyusun laporan kegiatan dan mendokumentasikan seluruh proses pengabdian sebagai bahan evaluasi dan publikasi hasil pengabdian.

3. HASIL

Hasil yang diharapkan dari kegiatan pengabdian ini adalah meningkatnya pemahaman masyarakat, khususnya kader ‘Aisyiyah dan warga sekitar, mengenai hak-hak kesehatan dari sisi hukum dan aspek medis. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan haknya dan berani memperjuangkan pelayanan kesehatan yang layak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan menghasilkan modul edukasi terpadu yang menggabungkan materi hukum dan kesehatan sebagai media pembelajaran yang dapat digunakan secara berkelanjutan. Lebih jauh, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi antara dosen bidang hukum dan kesehatan dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat. Kader ‘Aisyiyah yang menjadi mitra dalam program ini akan berperan sebagai agen literasi yang mampu menyebarkan pengetahuan mengenai hak kesehatan secara efektif di komunitas masing-masing. Dengan demikian, program ini tidak hanya berdampak langsung pada peserta, tetapi juga memberikan efek multiplier kepada masyarakat luas. Secara keseluruhan, kegiatan ini diharapkan menciptakan model pengabdian interdisipliner yang inovatif dan dapat direplikasi di daerah lain dengan karakteristik serupa, sehingga kontribusi perguruan tinggi dalam pemberdayaan masyarakat semakin optimal dan berkelanjutan.

Hasil utama yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya tingkat pemahaman masyarakat, khususnya kader ‘Aisyiyah dan warga sekitar, tentang hak-hak

kesehatan secara menyeluruh. Pemahaman ini mencakup aspek hukum terkait hak pasien, mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran layanan kesehatan, serta pengetahuan medis dasar yang mendukung kesadaran akan pentingnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat menjadi lebih aktif dan percaya diri dalam menuntut haknya, sehingga dapat memperbaiki kualitas layanan kesehatan yang diterima. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan modul edukasi interdisipliner yang mengintegrasikan materi hukum dan kesehatan secara kontekstual dan mudah dipahami oleh masyarakat. Modul ini tidak hanya berfungsi sebagai bahan ajar selama kegiatan pengabdian, tetapi juga sebagai referensi berkelanjutan yang dapat digunakan oleh kader 'Aisyiyah dalam melakukan penyuluhan secara mandiri di komunitasnya. Keberadaan modul ini diharapkan menjadi salah satu aset penting untuk meningkatkan kapasitas kader dalam literasi hak kesehatan secara berkelanjutan.

Kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat sinergi dan kolaborasi antara dosen dari bidang hukum dan kesehatan, yang selama ini mungkin bekerja secara terpisah. Melalui kerja sama ini, pengabdian kepada masyarakat menjadi lebih komprehensif dan berdampak luas, sekaligus menjadi contoh nyata kolaborasi interdisipliner yang dapat dikembangkan dalam berbagai program lain di masa depan. Selanjutnya, kader 'Aisyiyah yang menjadi mitra pelaksana di lapangan akan berperan sebagai agen perubahan yang efektif. Mereka akan mampu menyebarkan pengetahuan tentang hak kesehatan kepada anggota komunitas secara lebih luas, serta membantu masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan kesehatan yang sesuai dengan hak mereka. Peran aktif kader ini sangat penting untuk memastikan bahwa hasil edukasi tidak berhenti pada satu waktu, melainkan berlanjut dan memberikan dampak jangka panjang. Terakhir, dari sisi institusional, kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan model pengabdian masyarakat berbasis pendekatan interdisipliner yang inovatif dan dapat direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik sosial dan kebutuhan serupa. Model ini sekaligus mendukung kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dalam memperkuat peran perguruan tinggi sebagai agen perubahan sosial melalui pengabdian yang bermakna dan berdampak nyata.

4. DISKUSI

Pelaksanaan pengabdian masyarakat dengan pendekatan interdisipliner antara dosen hukum dan kesehatan merupakan langkah strategis untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang kompleks terkait literasi hak kesehatan. Diskusi terkait kegiatan ini menyoroti pentingnya sinergi keilmuan dalam memberikan edukasi yang tidak hanya fokus pada aspek medis, tetapi

juga aspek hukum yang melindungi hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan adil. Keterlibatan kader 'Aisyiyah sebagai mitra dalam program ini sangat relevan karena mereka memiliki jaringan yang luas dan pengaruh sosial di tingkat komunitas. Dengan peningkatan kapasitas kader, edukasi yang diberikan diharapkan dapat menjangkau lebih banyak individu secara efektif, sehingga terjadi penyebaran informasi yang berkelanjutan dan berdampak luas.

Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan mitra lokal merupakan kunci keberhasilan pengabdian masyarakat, terutama dalam konteks literasi hak kesehatan yang membutuhkan pendekatan persuasif dan adaptif terhadap karakteristik budaya lokal. Selain itu, pengembangan modul edukasi interdisipliner menjadi inovasi penting yang dapat mengatasi fragmentasi informasi yang selama ini terjadi antara bidang hukum dan kesehatan. Modul ini tidak hanya mempermudah pemahaman masyarakat, tetapi juga menjadi alat bantu yang efektif bagi kader dalam melaksanakan penyuluhan secara mandiri. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan daya tahan program, serta memberikan nilai tambah bagi pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek pengabdian masyarakat. Meski demikian, beberapa tantangan potensial perlu diperhatikan, seperti perbedaan bahasa teknis antara bidang hukum dan kesehatan yang harus dijembatani agar materi dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat umum. Selain itu, kesiapan dan motivasi kader 'Aisyiyah dalam menginternalisasi dan menyebarkan pengetahuan juga perlu didukung melalui pelatihan yang intensif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, evaluasi berkala dan umpan balik dari peserta menjadi sangat penting untuk memperbaiki dan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan.

Secara keseluruhan, kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan literasi hak kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi wadah pembelajaran dan kolaborasi interdisipliner yang dapat menjadi model bagi program-program pengabdian masyarakat di masa depan. Pendekatan yang holistik dan partisipatif diyakini mampu memberikan kontribusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat serta mendukung terciptanya pelayanan kesehatan yang lebih adil dan bermutu.

Identifikasi dan Koordinasi Mitra

Langkah awal kegiatan ini adalah menjalin komunikasi dan koordinasi dengan mitra pelaksana, yaitu pengurus dan kader Pimpinan Cabang 'Aisyiyah Bungkal. Koordinasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara lebih rinci kebutuhan literasi hukum dan kesehatan di masyarakat sasaran, termasuk karakteristik demografis, tingkat pendidikan, dan isu-isu kesehatan atau hukum yang dominan. Selain itu, hasil koordinasi juga akan digunakan untuk menentukan waktu, lokasi, serta format pelaksanaan kegiatan yang paling sesuai dan efektif.

Penyusunan Modul Edukasi

Setelah memperoleh data dari proses identifikasi awal, tim pelaksana yang terdiri dari dosen lintas disiplin (hukum dan kesehatan) akan menyusun modul edukasi sebagai acuan utama dalam kegiatan penyuluhan. Modul ini disusun dengan pendekatan integratif, menggabungkan aspek hukum (misalnya hak atas layanan kesehatan, perlindungan pasien, dan regulasi medis) dengan aspek kesehatan (misalnya hak atas informasi medis, layanan kesehatan primer, dan kesehatan reproduksi). Bahasa yang digunakan dalam modul akan disederhanakan agar mudah dipahami oleh masyarakat umum, serta disesuaikan dengan konteks lokal agar lebih relevan.

Sosialisasi dan Promosi Kegiatan

Sebelum kegiatan utama dilaksanakan, dilakukan sosialisasi program melalui jaringan internal Pimpinan Cabang 'Aisyiyah Bungkal, termasuk para kader dan tokoh masyarakat setempat. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memperkenalkan program kepada masyarakat, menjelaskan manfaatnya, serta mengundang partisipasi aktif dari warga. Sosialisasi dapat dilakukan melalui pengumuman di pertemuan rutin, media sosial lokal, dan selebaran atau pamflet yang disebarluaskan.

Pelaksanaan Edukasi Interaktif

Kegiatan inti berupa edukasi akan dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan dan seminar interaktif. Dalam sesi ini, narasumber dari bidang hukum dan kesehatan akan menyampaikan materi secara bergantian dan saling melengkapi. Untuk mendorong partisipasi aktif, akan dilakukan diskusi kelompok kecil, tanya jawab, dan penyajian studi kasus sederhana yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Metode interaktif ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta dan mendorong mereka untuk mengidentifikasi serta memperjuangkan hak-hak kesehatan mereka. Tahap pelaksanaan edukasi interaktif ditunjukkan dengan gambar 1.



Gambar 1. Tahap pelaksanaan edukasi interaktif

Distribusi Modul dan Media Edukasi

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan edukasi, setiap peserta dan kader akan menerima modul edukasi dalam bentuk cetak serta media pendukung lainnya, seperti infografis atau leaflet. Materi ini dimaksudkan agar peserta memiliki sumber rujukan yang dapat dibaca ulang atau dibagikan kepada anggota keluarga dan komunitas sekitar. Kader 'Aisyiyah yang telah mengikuti kegiatan juga diharapkan dapat menjadi agen diseminasi informasi, sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat tersebar secara lebih luas dan berkelanjutan.

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan edukasi berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak nyata bagi peserta. Evaluasi dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, tim akan menggunakan instrumen pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan, baik dari sisi hukum maupun kesehatan.

Secara kualitatif, tim akan mengumpulkan feedback dari peserta dan kader mitra melalui wawancara singkat, diskusi kelompok terfokus. Informasi yang diperoleh akan menjadi bahan pertimbangan untuk menyempurnakan metode, materi, maupun pendekatan pada kegiatan serupa di masa mendatang. Tahap monitoring dan evaluasi ditunjukkan padagambar 2.



Gambar 2. Monitoring dan evaluasi

Pelaporan dan Dokumentasi

Setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai, tim akan menyusun laporan kegiatan secara lengkap dan sistematis, mencakup latar belakang, pelaksanaan, hasil, kendala, evaluasi, dan tindak lanjut. Selain itu, tim juga akan melakukan dokumentasi menyeluruh, baik dalam bentuk foto, video, maupun catatan lapangan untuk merekam proses pengabdian dari awal hingga akhir. Dokumentasi ini tidak hanya berguna sebagai bahan evaluasi internal, tetapi juga dapat dijadikan materi publikasi hasil pengabdian, baik dalam bentuk artikel ilmiah, laporan ke lembaga, maupun konten media sosial untuk memperluas dampak dan penyebaran informasi kepada khalayak yang lebih luas.

5. KESIMPULAN

Program Pengabdian kepada Masyarakat ini dirancang sebagai upaya strategis untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai hak-hak kesehatan melalui pendekatan interdisipliner antara bidang hukum dan kesehatan. Melalui sinergi antara tim dosen lintas keilmuan dan kerja sama dengan mitra lokal, yaitu Pimpinan Cabang ‘Aisyiyah Bungkal, diharapkan kegiatan ini mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan pemahaman yang utuh terhadap hak atas pelayanan kesehatan, baik dari sisi regulasi maupun aspek medis.

Pelaksanaan kegiatan ini mencakup identifikasi kebutuhan, penyusunan modul edukatif, pelaksanaan edukasi interaktif, serta distribusi materi dan evaluasi dampak. Dengan metode yang partisipatif dan berbasis komunitas, program ini tidak hanya bersifat edukatif tetapi juga memberdayakan masyarakat sebagai agen perubahan di lingkungan sekitarnya. Secara keseluruhan, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendorong kesadaran hukum dan kesehatan masyarakat, serta menjadi model kolaborasi interdisipliner yang dapat direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik serupa.

DAFTAR REFERENSI

- Departemen Kesehatan RI. (2018). *Pedoman hak dan kewajiban pasien dan tenaga kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2021). *Profil kesehatan Indonesia tahun 2020*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Notoatmodjo, S. (2012). *Promosi kesehatan dan ilmu perilaku*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2014 tentang kewajiban rumah sakit dan hak pasien.
- Rahardjo, S. (2009). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sulistyaningrum, D. E. (2025). *Parenting: Peran orang tua dalam perkembangan mental dan seksual pada anak*. [Luaran TTG, Universitas Merdeka Malang].
- Sulistyaningrum, D. E. (2025). *Webinar nasional: LGBT dalam perspektif hukum Islam dan HAM*. [Dokumentasi TTG, Universitas Merdeka Malang].
- Sulistyaningrum, D. E., & Suyani. (2024). *Hukum jaminan*. Malang: PT. Mafy Media Literasi.
- Sulistyaningrum, D. E., & Tim. (2025). LGBT dalam perspektif hukum Islam dan HAM. *Jurnal HUMAYA*, 99(1), 1–20. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i3.7236>
- Sulistyaningrum, D. E., Amin, M., Suryadi, S., Halim, A., & Wahid, M. S. A. (2023). Pelatihan pengolahan sampah organik menjadi ecoenzyme untuk mengurangi pencemaran lingkungan. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 51–62. <https://doi.org/10.52062/cdj.v4i2.16407>
- Sulistyaningrum, D. E., Karyanto, P., & Sunarno, W. (2015). Pengembangan modul berbasis model pembelajaran ARIAS untuk memberdayakan motivasi dan berpikir kritis siswa pada materi ekosistem. *Inkuiri: Jurnal Pendidikan IPA*, 4(2). <https://jurnal.uns.ac.id/inkuiri/article/view/9576>
- Suryadi, S., Sulistyaningrum, D. E., et al. (2024). Analysis of the influence of the diversion of agricultural land management functions into non-agricultural ones. *Central Asian Journal of Social Sciences and History*, 5(1), 88–101.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- Zakiyah, A., & Fitrani, E. (2020). *Model pengabdian masyarakat interdisipliner: Kolaborasi dosen dalam pemberdayaan masyarakat*. Surabaya: LPPM Universitas Airlangga.